

**PELAKSANAAN HAK ISTIMEWA (*PRIVILEGE*) DALAM  
KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA  
KOTA MEDAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

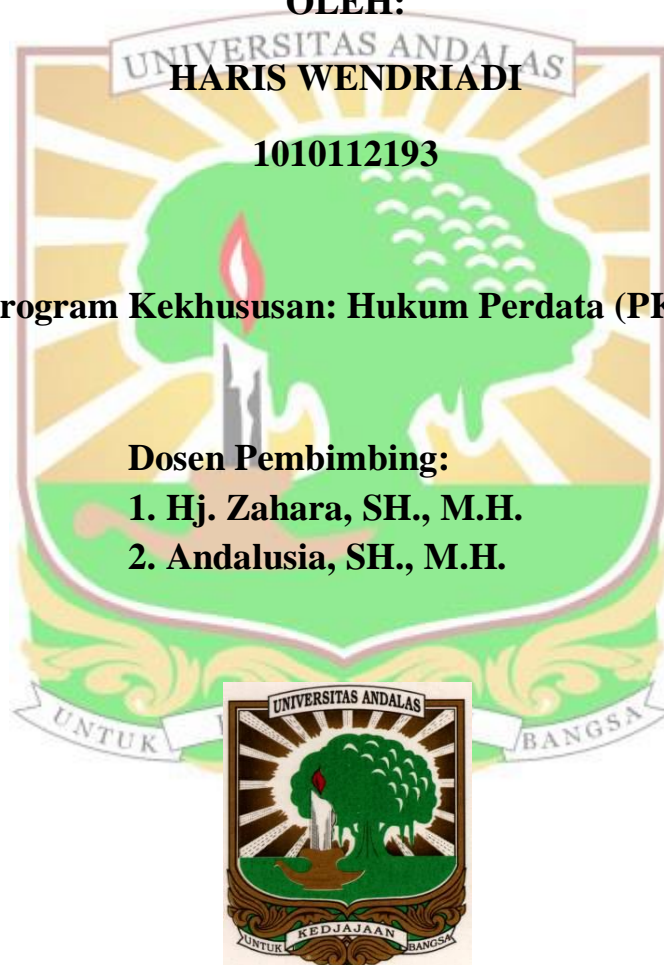
**HARIS WENDRIADI**

**1010112193**

**Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK I)**

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Hj. Zahara, SH., M.H.**
- 2. Andalusia, SH., M.H.**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2017**

# **PELAKSANAAN HAK ISTIMEWA DALAM KEPAILITAN DI PENGADILAN NIAGA KOTA MEDAN**

Haris Wendriadi, Zahara, Andalusia

## **ABSTRAK**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu dihadapkan dengan berbagai kebutuhan, namun tidak selamanya kebutuhan tersebut akan selalu lancar dalam pemerolehannya, ada kalanya unsur materiil tidak cukup, karena adanya faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhannya. lembaga kredit bisa digunakan sebagai alternatif untuk memperoleh pinjaman dana. Dana dipinjam berdasarkan perjanjian yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan bersifat mengikat, sehingga wajib dipatuhi. Saat perjanjian yang telah dibuat namun tidak dijalankan, maka akan terjadi wan prestasi. Namun hal ini hanya akan ditemui ketika jumlah si berpiutang tidak lebih dari satu. Pada kasus ini, terdapat banyak kreditor, sehingga kondisi debitor lebih tepat dikatakan dalam posisi pailit. Pailit menyebabkan timbulnya berbagai hak, salah satunya hak istimewa, hak istimewa diatur dalam Pasal 1134 KUH Perdata, yang menempatkan kreditor tersebut pada posisi yang didahulukan dalam penerimaan pelunasan. Walaupun didahulukan bukan berarti meniadakan eksistensi dari kreditor lain. Keberagaman dari kreditor ini, menuntut perlunya peran kurator yang profesional, sehingga tidak timbul perselisihan antara para pihak. Perumusan masalah dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak istimewa dalam kepailitan di pengadilan niaga kota medan; dan apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan hak istimewa dalam kepailitan di pengadilan niaga kota medan dan cara mengatasinya. Dalam penelitian, penulis melakukan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian bersifat deskriptif, dengan data primer dan sekunder. Alat pengumpul data yakni wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Dalam pelaksanaannya, kurator melakukan pengurusan boedel pailit. Pada akhirnya perdamaian tercapai melalui putusan hakim pemutus Pengadilan Niaga. Debitor dan kreditor saling memenuhi hak dan kewajiban, walaupun kemudian ada kendala transparansi harta dan tagihan tiba-tiba debitor. namun semuanya berjalan dengan normal melalui pengurusan yang baik serta berpegang pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

**THE IMPLEMENTATION OF PRIVILEGE RIGHT IN BANKRUPTCY  
AT COMMERCIAL COURT OF MEDAN CITY**

Haris Wendriadi, Zahara, Andalusia

**ABSTRACT**

In life, people are always faced with various needs, but not always the need will always smoothly in the acquisition, there are times when the material element is not enough, because of the factors that become obstacles in the fulfillment. Credit institutions can be used as an alternative to obtain loan funds. Funds are borrowed under an agreement in which there are elements that must be met by both parties and are binding, so it must be obeyed. When an agreement has been made but not executed, it will happen wan achievement. However this will only be encountered when the amount of the debtor is not more than one. In this case, there are many creditors, so the debtor's condition is more accurately said in the bankruptcy position. Bankruptcy causes a variety of rights, one of which privileges, privileges set forth in Article 1134 Civil Code, which puts the creditors in a position that takes precedence in the receipt of repayment. Although the precedence does not mean negating the existence of other creditors. The diversity of these creditors, demands the need for a professional curatorial role, so there is no dispute between the parties. The formulation of the problem is limited to issues relating to the exercise of privilege in bankruptcy in the commercial courts of the Medan City; And what obstacles are found in the exercise of privilege in bankruptcy in the city court commercial courts and how to overcome them. In the study, the authors take a sociological juridical approach, research is descriptive, with primary and secondary data. Data collection tool that is interview and document study. Data analysis used is qualitative data analysis. In practice, the curator commissioned a bankruptcy boedel. Ultimately peace is achieved through the decision of a Commercial Court trial judge. Debtors and creditors meet each other's rights and obligations, although then there is the constraint of property transparency and sudden debtor bills. But everything works normally through good management and in accordance with Law no. 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and PKPU.